

**Judul** : Anggaran untuk KDMP Diusulkan Naik  
**Tanggal** : Jumat, 12 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 11

## Anggaran untuk KDMP Diusulkan Naik

Di tengah ruang fiskal yang menyempit, Kementerian Koperasi meminta anggaran dinaikkan hingga tiga kali lipat pada 2027 untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih.

JAKARTA, KOMPAS – Menteri Koperasi meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat agar menambah pagu anggaran tahun 2027 sekitar Rp 1,3 triliun atau tiga kali lipat dari pagu yang sudah ditetapkan sebesar Rp 542 miliar. Tambahan anggaran itu dinilai penting untuk mendukung kerja kementerian yang turut terlibat dalam mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliano mengemukakan, berdasarkan surat bersama mengenai pagu indikator anggaran 2027, alokasi anggaran Kemendagri hampir seluruhnya diarahkan untuk mendukung program KDMP. Nilai pagu sekitar Rp 542 miliar itu dinilai tidak memadai, mengingat Kemendagri ikut mendapat tugas untuk mempercepat operasionalisasi KDMP sebagai program prioritas nasional.

Ferry mengklaim kebutuhan mendukung percepatan operasionalisasi KDMP ada banyak sekali. Misalnya, penguatan infrastruktur teknologi informasi, pendampingan kapasitas usaha, penanganan pengaduan, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan gerakan koperasi.

"Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program prioritas nasional KDMP yang diamanatkan kepada Kemendagri, kami mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun. Dengan tambahan tersebut, total pagu indikator 2027 menjadi sekitar Rp 1,8 triliun," ujar Ferry saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Tambahan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun itu akan dipakai untuk kebutuhan dukungan manajemen kementerian dan program perkoperasian yang sudah ada, termasuk kegiatan terkait KDMP. Nilai anggaran untuk dukungan manajemen sekitar Rp 228 juta, sedangkan program perkoperasian Rp 1,1 triliun.



Suasana gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (16/5/2026).

Di luar anggaran, Ferry turut menyampaikan perkembangan realisasi KDMP. Saat ini, KDMP yang pembangunan fisiknya (gudang, gerai, dan alat kelengkapan lain) sudah rampung adalah 12.533 unit. Adapun yang konstruksinya sedang berjalan ada 22.737 unit, sedangkan jumlah yang benar-benar operasional baru 1.061 unit.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Darmadi Durianto, yang hadir saat

rapat kerja, mendukung usulan tambahan anggaran Kemendagri sekitar Rp 1,3 triliun pada 2027. Menurut dia, nilai itu tidak berlebihan karena beberapa tahun lalu anggaran Kemendagri pernah mencapai Rp 1 triliun hingga Rp 1,8 triliun.

### Kesiapan dipertanyakan

Meski demikian, dia mengkritisi kesiapan pelaksanaan KDMP. Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah gerai berada di lokasi kurang strategis,

seperti dekat area pemakaman, di kawasan yang sepi penduduk, hingga berdiri di lokasi yang saling berdekatan. Atas dasar itu, ia menduga KDMP hanya dibuka untuk memenuhi target pendirian gerai saja. Ini bisa berujung pada risiko mangkrak atau tutup setelah diresmikan.

Darmadi juga mengatakan, dirinya belum memahami seperti apa indikator keberhasilan KDMP yang diinginkan pemerintah. Sebab, jika orientasinya hanya mengejar jumlah gerai,

program itu berpotensi menghasilkan banyak koperasi, tetapi bisnisnya tidak berkelanjutan.

Darmadi juga mengkritisi model bisnis KDMP yang sampai sekarang masih belum jelas. Dia mendapat informasi bahwa ada sejumlah unit yang mengambil pasokan barang dari distributor yang sama dengan jaringan ritel modern.

"Jika menjual produk yang sama tanpa diferensiasi yang kuat, KDMP akan sulit bersaing di pasar. Lalu, kapan KDMP

menampung dan mendistribusikan barang hasil pertanian dari desa?" katanya.

Saat pembahasan kesimpulan rapat, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto selaku pimpinan rapat mengatakan, Komisi VI menerima penjelasan Menkop terkait pagu anggaran indikator 2027 beserta usulan tambahan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun. Komisi VI juga mendorong Kemendagri untuk meningkatkan perhatian terhadap fungsi pem-

biayaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan KDMP.

Kemendagri juga diminta memperkuat aspek perencanaan, studi kelayakan, pengawasan, pembinaan, indikator kinerja, serta peta jalan bisnis KDMP. Tujuannya agar tidak menimbulkan risiko tingginya jumlah KDMP yang mangkrak di masa depan.

"Kami meminta Kemendagri melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh terhadap kelayakan lokasi, potensi usaha, serta kebutuhan masyarakat sebelum KDMP beroperasi," kata Adisatrya.

Selain itu, Komisi VI DPR meminta pengembangan KDMP harus tetap sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila, yakni mendorong persaingan usaha yang sehat, memperkuat ekonomi rakyat, dan tidak mematikan pelaku usaha lain yang sudah lama berdiri.

### Paradoks

Pemerhati kebijakan publik dan peneliti Yayasan Asel Bangsa Indonesia, Yenny Sucipto, berpendapat, di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih mendesak, mulai dari terbatasnya lapangan kerja, daya beli, hingga pelayanan dasar, tambahan anggaran untuk KDMP dalam APBN yang berjumlah besar akan menuntut justifikasi yang kuat. Publik berhak mengetahui mengapa anggaran ekstra itu menjadi prioritas dan bagaimana manfaatnya akan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Ia menilai permintaan tambahan anggaran ini paradoks. Pemerintah menempatkan KDMP sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat, tetapi pada saat yang sama memperbesar intervensi negara melalui anggaran untuk membangun koperasi, semakin relevan pula pertanyaan publik: apakah yang sedang diperkuat adalah gerakan ekonomi rakyat, atau justru perluasan instrumen negara hingga ke tingkat desa? ujarnya. (MED)